

LAPORAN KEUANGAN

**KANTOR CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



TAHUN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. Pernyataan Tanggung Jawab	1
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2
3. Laporan Operasional	3
4. Laporan Perubahan Ekuitas	5
5. Neraca	6
6. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
I. Kebijakan Akuntansi	7
1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	7
1.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan	8
1.3 basis pengukuran	9
1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	9
A. Laporan Realisasi Anggaran	9
1. Akuntansi Pendapatan – LRA	9
2. Akuntansi Belanja [LRA]	9
3. Akuntansi Surplus Defisit	10
B. Laporan operasional	11
1. Akuntansi Pendapatan – LO	12
2. Akuntansi Beban	12
3. Akuntansi Surplus Defisit	14
C. Laporan Perubahan Ekuitas	14
D. Neraca	15
1. Aset	15
2. Kewajiban	23
3. Ekuitas	25
A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	26
1. Pendapatan	26
2. Belanja	27
a. Belanja Operasi	27
b. Belanja Modal	28

B.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	28
1.	Pendapatan – LO	28
2.	Beban	29
a.	Beban Operasional	29
C.	Penjelasan Akun-Akun Laporan Ekuitas [LPE]	30
1.	Ekuitas Awal	30
2.	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional [LO]	30
3.	Ekuitas Akhir	30
D.	Penjelasan Pos-Pos Neraca	30
1.	Aset	30
a.	Aset Lancar	30
1)	Piutang Pendapatan	30
2)	Persediaan	31
b.	Aset Tetap	31
1)	Tanah	31
2)	Peralatan dan Mesin	31
3)	Gedung dan Bangunan	32
4)	Aset Tetap Lainnya	32
2.	Kewajiban	33
a.	Kewajiban Jangka Pendek	33
3.	Ekuitas Dana	33
E.	Penutup	34
7.	Daftar Lampiran	35

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, Februari 2023

Camat Praya
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ MURNIATI, S.Sos
NIP. 197405081993112001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CAMAT PRAVA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 5 = (4/ 3) * 100	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4/ 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah				
4.1.02	Retribusi Daerah				
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.866.759,00		3.883.178,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah		9.866.759,00		3.883.178,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		9.866.759,00		3.883.178,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				
			-		3.883.178,00
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	9.402.055.574,00	8.676.804.276,00	92,29	8.512.332.232,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.476.223.017,00	8.381.989.484,00	98,89	8.605.727.139,00
	Jumlah Belanja Operasi	17.878.278.591,00	17.058.793.760,00	95,42	17.118.059.371,00
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.01	Belanja Modal Tanah				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	133.842.345,00	130.962.700,00	97,85	679.772.850,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	244.309.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.04	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan				
5.2.04	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	148.842.345,00	145.962.700,00	98,07	924.081.850,00
	Jumlah Belanja Modal	18.027.120.936,00	17.204.756.460,00	95,44	18.042.141.221,00
	JUMLAH BELANJA				
		(18.027.120.936,00)	(17.194.889.701,00)	95,38	(18.038.258.043,00)
	SURPLUS/DEFISIT				

Prava, Januari 2023
CAMAT PRAVA,

BAJO MURINTAT S.Sos
NIP. 197405081993112001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CAMAT PRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

AKUN AKRUA	URAIAN	KANTOR CAMAT PRAYA			
		SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN /(PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
4	PENDAPATAN DAERAH-LO				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.866.759,00	3.883.178,00	5.983.581,00	154,09
4 1 1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
4 1 2	Retribusi Daerah	-	-	-	-
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	9.866.759,00	3.883.178,00	5.983.581,00	154,09
4 2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
4 3 1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4 3 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	9.866.759,00	3.883.178,00	5.983.581,00	154,09
5	BEBAN DAERAH				
5.1	BEBAN OPERASI	17.914.737.148,00	17.740.009.724,98	174.727.423,02	0,98
5 1 1	Beban Pegawai	8.890.332.020,00	8.513.566.526,00	376.765.494,00	4,43
5 1 2	Beban Barang dan Jasa	8.397.680.725,00	8.613.286.242,00	(215.605.517,00)	(2,50)
5 1 3	Beban Bunga	-	-	-	-
5 1 5	Beban Hibah	-	-	-	-
5 1 6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Beban Penyisihan	-	-	-	-
	Beban Lain-lain	-	-	-	-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	626.724.403,00	613.156.956,98	13.567.446,02	2,21
	Beban Transfer/Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Beban Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	17.914.737.148,00	17.740.009.724,98	174.727.423,02	0,98
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	(17.904.870.389,00)	(17.736.126.546,98)	(168.743.842,02)	0,95
	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL				

	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek - LO	-				
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-				
	DEFISIT NON OPERASIONAL	-				
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-				
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-				
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17.904.870.389,00)	(17.736.126.546,98)	(168.743.842,02)		0,95
	POS LUAR BIASA					
	Pendapatan Luar Biasa	-				
	Beban Luar Biasa	-				
5.3.1.01.01	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-				
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(17.904.870.389,00)	(17.736.126.546,98)	(168.743.842,02)		0,95

Praya, 1 Januari 2022
CAMAT PRAYA

BAIQ MURNIATI, S.Sos
NIP. 197405081993112001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CAMAT PRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 1 DESEMBER 2022 dan 2021

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	10.859.001.470,84	10.552.121.925,82
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(17.904.870.389,00)	(17.736.126.546,98)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	(1.445.051,00)
	Koreksi Nilai Kas	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	-
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Nilai Investasi	-	-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	-	(1.445.057,00)
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	6,00
	R/K PPKD	17.205.133.664,00	18.044.451.143,00
4	EKUITAS AKHIR	10.159.264.745,84	10.859.001.470,84

Praya, 1 Januari 2023

CAMAT PRAYA

BAIQ MURNIATI, S.Sos

NIP. 197405081993112001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CAMAT PRAYA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

(Dalam Ribu)

NO	URAIAN	2022	2021
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	10.243.963,00	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan		-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.243.963,00	-
6	Kas di BLUD	-	-
7	Setara Kas	-	-
8	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
9	Kas di Bendahara BOS	-	-
10	Kas lainnya	-	-
11	Piutang Pendapatan	-	-
12	Piutang Pajak Daerah	-	-
13	Piutang Retribusi Daerah	-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
15	Piutang Lain-lain PAD	-	-
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
17	Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
18	Piutang Lainnya	-	-
19	Uang Muka Pkerjaan	-	-
20	Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
21	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-
23	Persediaan		
24	JUMLAH ASET LANCAR	10.243.963,00	-
26	ASET TETAP		
27	Tanah	5.531.110.000,00	5.531.110.000,00
28	Peralatan dan Mesin	3.840.751.244,94	3.709.788.544,94
29	Gedung dan Bangunan	3.576.612.963,88	3.576.612.963,88
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.843.800,00	5.843.800,00
31	Aset Tetap Lainnya	945.000,00	945.000,00
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
33	Akumulasi Penyusutan	(2.588.832.466,98)	(1.962.108.063,98)
34	JUMLAH ASET TETAP	10.366.430.541,84	10.862.192.244,84
36	ASET LAINNYA		
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
38	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	-	-
39	Aset Tidak Berwujud		
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
41	Aset Lain-lain		
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
43	JUMLAH ASET LAINNYA		
45	JUMLAH ASET	10.376.674.504,84	10.862.192.244,84
47	KEWAJIBAN		
48	Kewajiban Jangka Pendek		
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
50	Utang Bunga	-	-
51	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
52	Utang Belanja	210.664.921,00	3.190.774,00
53	Utang Transfer	-	-
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
55	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	210.664.921,00	3.190.774,00
57	JUMLAH KEWAJIBAN	210.664.921,00	3.190.774,00
58	EKUITAS		
59	EKUITAS	10.166.009.583,84	10.859.001.470,84
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10.376.674.504,84	10.862.192.244,84

Praya, Januari 2023

CAMAT PRAYA

BAIQ MURNIATI, S.Sos
NIP. 197405081993112001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CAMAT PRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan .
- b. Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c. Asumsi ketrukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

1.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui saat kas dikeluarkan.

a. Basis Akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa :

1. Pendapatan – LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima
2. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah/ kas SKPD

b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :

1. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas

aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

1.3 Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Secara rinci, antara lain :

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1. Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran

(STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2. Akuntansi Belanja (LRA)

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

c) Belanja Lainlain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3. Akuntansi Surplus Defisit

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit - LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

B. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer,

dan akun-akun luar biasa. Masing- masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Akun Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.

1. Akuntansi Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan menurut PP no 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

b. Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan yaitu; Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Bukan Pajak –LO, Pendapatan Hibah-LO, Pendapatan Lainnya. Pendapatan-LO diakui saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan

Pendapatan-LO yang diakui saat timbulnya hak adalah:

- Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan rundang-undangan
- Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

b) Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi)

Untuk mengakui Pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan

2. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Klasifikasi Beban

1) Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

2) Beban Transfer

Beban Transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak, Beban bagi Hasil Pendapatan lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan ke Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya

3) Beban Non Operasional

Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari:

- Defisit penjualan aset non lancar
- Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang
- Defisit dari kegiatan non operasional lainnya

4) Beban Luar Biasa

Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa.

Yang termasuk kejadian luar biasa adalah:

- Tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran
- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- Kejadiannya diluar kendali pemerintah

Beban diakui saat :

✓ Timbulnya kewajiban

Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah

✓ Terjadinya konsumsi aset

Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah

✓ Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berjalanya waktu.

✓ Koreksi atas Beban (penerimaan kembali) yang terjadi pada

periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan.

3. Akuntansi Surplus Defisit – LO

Surplus –LO adalah selisih lebih antara pendapatan- LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Defisit - LO adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

C. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas (net aset).

1. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) **Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

(1) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.

(2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.

- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendahraan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan

untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen :

(1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat.

Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta

biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih

harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan

penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. Aset ini merupakan kewenangan PPKD bukan SKPD, sehingga dalam laporan keuangan SKPD Inspektorat Kab. Loteng tidak terdapat Tagihan Jangka Panjang/ tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Namun data ini muncul di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

(4) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

2. Kewajiban

adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah

diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang :

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

(4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Camat Praya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember Tahun 2022 senilai Rp9.866.759,00 yang terdiri dari pengembalian temuan insfektorat atas kekurangan volume pekerjaan fisik 9.525.108,00 dan kelebihan atas pembayaran pengembalian sisa kas tahun berjalan Rp.341.651,00

2. BELANJA

Anggaran Belanja Daerah yang tertuang dalam APBD Per 31 Desember TA 2022 adalah senilai Rp.18.193.512.884,00 dengan realisasi yang mencapai Rp.17.204.756.460,00 atau 94,51%.

Adapun perincian dari realisasi belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	17.878.278.591,00	17.058.793.760,00	95,42	17.118.059.371,00
2.	Belanja Modal	148.842.345,00	145.962.700,00	98,07	924.081.850,00
Jumlah		18.027.120.936,00	17.204.756.460,00	95,44	18.042.141.221,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Per 31 Desember TA 2022 terealisasi senilai Rp.17.058.793.760,00 atau 95,42% dari anggaran senilai Rp.17.878.278.591,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	9.402.055.574,00	8.676.804.276,00	92,29	8.512.332.232,00
2	Belanja Barang dan Jasa	8.476.223.017,00	8.381.989.484,00	98,89	8.605.727.139,00
Jumlah		17.878.278.591,00	17.058.793.760,00	95,42	17.118.059.371,00

4. Belanja Modal

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember TA 2022 senilai Rp.130.962.700,00 atau 97,85% dari anggaran senilai Rp. 133.842.345,00. Realisasi belanja modal seluruh merupakan belanja peralatan dan mesin. Adapun rincian dari masing-masing Belanja Modal adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.842.345,00	130.962.700,00	97,85	679.772.850,00
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	311.490.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	76.000.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	13.500.000,00

Belanja Modal Mebel	37.774.000,00	35.894.400,00	95,02	103.932.700,00
Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	-	2.385.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	5.351.820,00	5.351.800,00	100,00	16.523.400,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.966.525,00	9.966.500,00	100,00	20.250.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	270.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	-	-	-	5.000.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	63.750.000,00	62.750.000,00	98,43	90.950.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	36.250.000,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	-	-	-	3.221.750,00
Jumlah	133.842.345,00	130.962.700,00	97,85	679.772.850,00

- **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Per 31 Desember TA 2022 senilai Rp.15.000.000,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp. 15.000.000,00. Adapun rincian dari masing-masing Belanja Modal adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	244.309.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	232.309.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	12.000.000,00

	Tempat Pertemuan				
	Belanja Modal Tugu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	244.309.000,00

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Camat Praya Per 31 Desember 2022.

1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan Operasi Kantor Camat Praya adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp.9.866.759,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Retribusi	9.866.759,00	3.883.178,00
2	Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00
	TOTAL	9.866.759,00	3.883.178,00

Pendapatan-LO di atas diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pada saat pendapatan tersebut direalisasikan.

Pendapatan Asli Daerah-LRA Kantor Camat Praya senilai Rp.9.866.759,00 masih sama dengan Pendapatan Asli Daerah LO senilai Rp.9.866.759,00.

2. BEBAN

Beban pada Kantor Camat Praya untuk periode 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.699.471.310,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. **Beban Operasional**

Beban Operasi Per 31 Desember 2022 merupakan beban yang ditanggung oleh SKPD dalam hal ini Kantor Camat Praya selama satu tahun Anggaran adalah sebesar Rp.17.907.992.310,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Jenis Beban	2022	2021
1	Beban Pegawai	8.884.090.982,00	8.513.566.526,00
2	Beban Barang dan Jasa	8.397.176.925,00	8.613.286.242,00
3	Beban Penyisihan	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	626.724.403,00	613.156.956,98
J u m l a h		17.907.992.310,00	17.740.009.724,98

1) Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional

Defisit Operasional Per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 17.898.125.551,00 terdiri dari:

No.	Jenis Beban	2021	2020
1	Pendapatan-LO	9.866.759,00	3.883.178,00
2	Beban-LO	17.907.992.310,00	17.740.009.724,98
Surplus/(Defisit) Operasional		(17.898.125.551,00)	(17.736.126.546,98)

2) Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Sampai dengan Per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebesar Rp(0,00)

C. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas per 31 Desember tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp.10.859.001.470,84. Ekuitas awal merupakan ekuitas akhir tahun 2021.

2. Surplus/(Defisit)-Laporan Operasional (LO)

Defisit-(LO) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 senilai Rp.(17.898.125.551,00)

3. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.10.166.009.583,84 (*Sepuluh Miliar Seratus Enam puluh Enam Juta Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Empat Sen*).

D. PENJELASAN POS-POS NERACA

1. ASET

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 senilai Rp10.243.963,00 terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Praya per 31 Desember 2022 senilai Rp10.243.963,00 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Renteng Rp10.193.963,00 dan kas di Bendahara Pengeluaran kelurahan Praya Rp50.000.

2) Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. berdasarkan pemeriksaan fisik (stock opname) Kantor Camat Praya tidak terdapat Persediaan (nihil)

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 setelah penyusutan senilai Rp.10.366.430.541,84.

Tabel Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah	5.531.110.000,00	5.531.110.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.840.751.244,94	3.709.788.544,94
3	Gedung dan Bangunan	3.576.612.963,88	3.576.612.963,88
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	5.843.800,00	5.843.800,00
5	Aset Tetap Lainnya	945.000,00	945.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah Perolehan Aset Tetap	12.955.263.008,82	12.824.300.308,82
	Penyusutan Aset Tetap	(2.588.832.466,98)	(1.962.108.063,98)
	Jumlah	10.366.430.541,84	10.862.192.244,84

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

1) Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp.5.531.110.000,00 Aset ini merupakan tanah pada Kantor Camat Praya.

2) Peralatan dan Mesin

Saldo Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp.3.840.751.244,94. Terdapat penambahan akumulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp.130.962.700,00. Penjelasan terkait penambahan asset dari belanja modal dapat di lihat pada penjelasan Pos LRA.

3) Gedung dan Bangunan

Saldo perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.3.576.612.963,88, merupakan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Kantor Camat Praya.

4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.5.843.800,00,

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp.945.000,00.

2. KEWAJIBAN

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 senilai Rp.210.664.921 yang terdiri dari Utang Belanja Air sebesar Rp.899.909,00 Utang Belanja Listrik Sebesar Rp.841.312,00 dan Utang Belanja Internet sebesar Rp.402.700,00 dan Utang Belanja Pegawai Berupa TPP sebesar Rp.208.521.000,00 .

3. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 senilai Rp.10.166.009.583,84 (*Sepuluh Miliar Seratus Enam puluh Enam Juta Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Empat Sen*).

E. PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan.

Praya, Februari 2023
Camat Praya
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ MURNIATI, S.Sos
NIP. 197405081993112001